

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

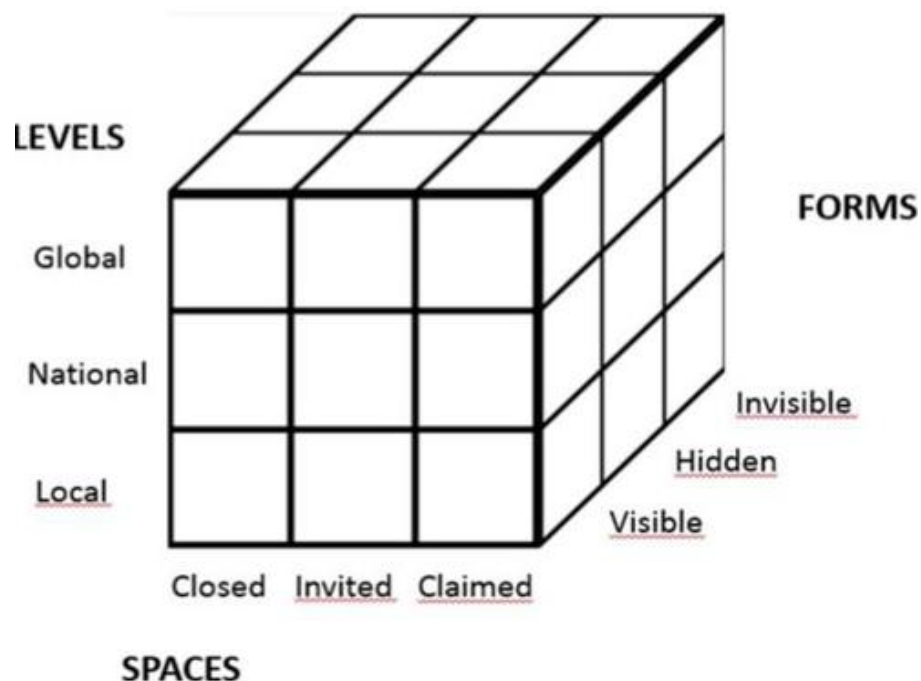
2.1.1 Teori Power Cube

Teori *Power cube* ini dicetuskan oleh John Gaventa yang cenderung mengikuti pemikiran dari gurunya yaitu Steven Lukes mengenai kubu radikal yang dikenal dengan *three-dimensional view of power (three faces of power approach)*. Steven lukes menjelaskan mengenai tiga dimensi dalam bukunya yang berjudul *Power a radical View*. Dimensi yang pertama menjelaskan mengenai kekuasaan yang berfokus pada satu hal saja, mengenai tindakan para aktor dalam mengambil keputusan. Dimensi kedua menjelaskan terhadap kepentingan para aktor dalam bentuk pilihan atau bahkan keluhan. Dan yang terakhir Dimensi yang ketiga memperhatikan mengenai aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik dan sekaligus melihat kontrol terhadap agenda tersebut (Asrida, Amin, and Marta 2019). Pemikiran yang dicetuskan oleh steven lukes menginspirasi John Gaventa untuk menciptakan teori kubus kekuasaan.

Teori Kubus Kekuasaan (*Power cube*) sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisis tiga dimensi kekuasaan yaitu dimensi *level* (dimensi tingkatan), dimensi *space* (dimensi ruang) dan dimensi *forms* (dimesi bentuk). Analisis kekuasaan dalam teori power cube sangat dinamis, bukan dengan pendekatan yang statis, karena teori ini melihat dan memahami bagaimana kekuasaan (*power*) bekerja dalam konteks sosial dan politik. Oleh karena itu, dalam power cube ini mempromosikan refleksi kritis terhadap relasi yang terlibat, tidak hanya

menjelaskan kategori atau tipe tipe kekuasaan saja. Dengan teori kubus kekuasaan (*power cube*) ini memudahkan kita juga melihat dan memetakan hal-hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor didalamnya serta persoalan dan situasi yang melatarbelakanginya, menurut John Gaventa Kekuasaan mempunyai tiga dimensi (Gaventa dalam Halim, 2014) dan diilustrasikan dalam bentuk kubus seperti berikut.

Gambar 2.1. Kubus Teori Power Cube



Sumber: Buku Gaventa 2009

- 1) Dimensi *Level* (Dimensi tingkatan) yang terdiri atas tingkatan lokal, Nasional dan Global.

Dimensi *level* menunjukkan bahwasanya Dimana kekuasaan dijalankan dan juga dipraktikan. Menurut gaventa kekuasaan tidak hanya terpusat di satu tempat, tetapi tersebar di berbagai Tingkatan dan saling

berkaitan, lebih singkatnya dimensi *level* ini menjelaskan skala kekuasaan, mulai dari individu, kelompok, komunitas hingga negara atau internasional. Ada tiga tingkatan dalam dimensi *level* ini yaitu lokal, nasional dan internasional

a. Lokal

Kata lokal jika dilihat di kamus besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dekat atau sekitar. Secara umum kata lokal ini mengacu kepada daerah atau tempat tertentu. Dalam konteks *Power Cube* ini lokal merujuk pada tingkatan kekuasaan yang berada di desa, kota, atau daerah tertentu. Kekuasaan lokal merupakan kekuasaan dalam pemerintahan lokal yang dapat menjadi kekuatan penting sekaligus dominan dan terkadang juga dipengaruhi bahkan dikooptasi oleh kekuasaan global dan kekuasaan nasional. (Asrida, Amin, and Marta 2019). Pengambilan keputusan di tingkat daerah sangat penting karena bisa digunakan untuk mendukung atau menantang kekuasaan pusat. Di negara dengan sistem federal seperti Amerika Serikat dan India, pemerintah negara bagian punya peran besar dan lembaga sendiri untuk membuat keputusan. Beberapa tahun terakhir, program desentralisasi juga membuat peran pemerintah lokal semakin penting, baik lewat program resmi dari pemerintah daerah maupun lewat berbagai cara lain, seperti ikut serta dalam proyek pembangunan, layanan masyarakat, atau melalui organisasi seperti LSM. Gaventa menekankan bahwa kekuasaan di

tingkat lokal sering kali lebih nyata dan langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena keputusan yang diambil di level ini menyangkut kebutuhan sehari-hari, seperti akses terhadap sumber daya, layanan publik, dan partisipasi dalam kebijakan daerah. (Gaventa 2009)

b. Nasional

Kata Nasional dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berarti kebangsaan atau yang berkaitan dengan suatu bangsa, seperti kebudayaan, cita-cita, atau identitas suatu bangsa. Lebih detailnya, "nasional" juga bisa merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan negara atau tindakan yang dilakukan oleh negara. Kekuasaan nasional tercermin dari pemerintah nasional yang secara resmi mempresentasikan warga negara didalam arena pemerintahan global.

Meskipun semakin penting badan supra nasional yang berasal dari pemerintahan internasional atau regional, Peran dari pemerintahan nasional masih merupakan salah satu titik masuk penting untuk melakukan perubahan. Peran Pemerintah nasional yang secara resmi mewakili warga negara di arena pemerintahan global, atau yang dapat memutuskan untuk melakukan perjanjian internasional atau tidak, dan aktor yang termasuk dalam tingkatan nasional ini meliputi parlemen, badan eksekutif, partai politik Nasional, elit ekonomi, dan sejenisnya. Gaventa menekankan bahwa

pada level nasional, kekuasaan tidak hanya bersifat formal (seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga mencakup pengaruh aktor non-pemerintah, seperti partai politik, media nasional, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan. (Gaventa 2009)

c. Global

Secara umum kata global dapat dimaknai dalam dua hal menurut KBBI kata global berarti secara luas atau secara menyeluruh, bukan hanya bagian kecil atau spesifik. Misalnya, memberikan penjelasan secara global berarti memberikan penjelasan secara garis besar atau secara singkat. Dalam arti lain berarti berkaitan dengan seluruh dunia, tidak terbatas pada satu negara atau wilayah tertentu. Contohnya, isu global adalah isu yang berdampak pada seluruh dunia. Jika disimpulkan kata global sendiri merujuk pada sesuatu yang luas, menyeluruh, dan berdampak pada seluruh dunia.

Globalisasi telah menciptakan beragam ruang formal maupun informal, negara maupun non negara untuk berpartisipasi ditingkat internasional. Kekuasaan di level global dapat dimaknai dalam konteks formal maupun non formal dalam bingkai negara (state) maupun non negara (nonstate). Kekuasaan supra-nasional berwujud dalam beberapa lembaga internasional seperti lembaga PBB, World Bank, IMF dan juga forum-forum yang melahirkan

kesepakatan global yang mengikat banyak negara.(Asrida, Amin, and Marta 2019).

- 2) Dimensi *space* (Dimensi ruang) terdiri atas ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenankan (*invited*), dan ruang yang diklaim (*claimed*).

Dimensi ini menjelaskan di mana kekuasaan dijalankan atau arena tempat interaksi kekuasaan terjadi. Gaventa membaginya menjadi tiga jenis ruang:

- a. Ruang tertutup (*closed*)

Ruang tertutup adalah ruang di mana keputusan dibuat oleh segelintir aktor atau elit kekuasaan tanpa partisipasi publik atau kelompok masyarakat luas. Masyarakat atau kelompok yang terkena dampak tidak diberi kesempatan untuk terlibat atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Ruang tertutup sebagai tempat pembuatan kebijakan, dihuni oleh aktor dan elite yang berperan sebagai stakeholder atau para pemangku kebijakan seperti ekonom, militer dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, keputusan-keputusan yang diciptakan di “belakang pintu”. (*Halim, 2014*).

Ruang tertutup sering melibatkan isu-isu seperti kebijakan perdagangan, ekonomi makro dan keuangan, kebijakan militer, dll. Yang memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat tetapi dianggap di luar batas untuk partisipasi publik. Meskipun kami

dapat menghargai hak demokratis orang untuk berpartisipasi lebih penuh dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dalam praktiknya di banyak pengaturan ruang pengambilan keputusan ditutup. Keputusan dibuat oleh sejumlah aktor di balik pintu tertutup, tanpa alasan memperluas batasan untuk dimasukkan.

b. Ruang yang di undang (*invited*)

Ruang yang diundang merupakan ruang yang diatur sedemikian rupa sebagai tempat berpartisipasi masyarakat luas. Dalam konteks daerah, “ruang yang diperkenankan” berarti ruang yang diatur sebagai ruang partisipasi masyarakat daerah dalam proses politik daerah (Asrida, Amin, and Marta 2019). Ruang yang di undang juga bisa disebut sebagai cara penguasa untuk berdialog ataupun berdiskusi dengan Masyarakat dan memberikan Kesan yang baik bagi Masyarakat. hal ini berangkat dari tuntutan Masyarakat ketika hendak mengkonsultasikan persoalan kepada pemerintah. Sebagai ruang kekuasaan ruang yang di undang (*invited space*) tidak hanya hadir di Tingkat lokal saja, tetapi di Tingkat nasional dan global atau internasional.

Dibanyak masyarakat dan pemerintahan, tuntutan untuk berpartisipasi telah menciptakan peluang baru untuk keterlibatan dan konsultasi, biasanya melalui undangan dari berbagai otoritas, baik itu pemerintah, lembaga supranasional, atau organisasi nonpemerintah. Ruang yang diundang dapat diatur, yaitu

dilembagakan dan berkelanjutan, seperti yang sering kita temukan di berbagai forum partisipatif yang dibentuk secara hukum, atau lebih sementara, melalui konsultasi satu kali. Seiring dengan pertumbuhan bentuk-bentuk baru 'tata kelola partisipatif', ruang-ruang ini terlihat di setiap tingkatan, dari kebijakan lokal, nasional, dan bahkan forum global, dan sering kali juga di dalam organisasi dan tempat kerja. Strategi untuk memperkuat partisipasi di ruang yang diundang termasuk memperoleh pengetahuan dan keahlian tentang isu-isu dan peraturan utama, dan mempelajari seni berbicara di depan umum, bernegosiasi, dan berkompromi. Bagi banyak kelompok yang sebelumnya dikecualikan, yang terbiasa menuntut agar ruang tertutup dibuka, atau partisipasi dalam ruang yang mereka klaim sendiri, ini mungkin memerlukan keterampilan baru. (Gaventa 2009)

c. Ruang yang Dibuat/Diklaim (*Claimed*)

Jika ruang tertutup hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu dan masyarakat seringkali berusaha mengkritisnya, ruang yang diperkenankan adalah ruang terbuka bagi siapa saja untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya. Sementara, pada ruang yang diciptakan (*claimed or created spaces*) adalah berada di luar keduanya. Ruang ini berupa gerakan sosial untuk mengontrol dua ruang tersebut, yang terbentuk sebagai balance atau kekuatan formal atau kekuatan tersembunyi. (Chalik 2015).

Menurut (cownfall dalam Chalik 2015), menyebut ruang yang diciptakan sebagai ruang “organic” (*organic spaces*) serta ruang untuk mengontrol bahkan melawan hegemoni. Corwall menyebut ruang ini muncul sebagai akibat dari serangkaian kepedulian atau identifikasi yang sama dan mungkin muncul sebagai akibat dari mobilisasi populer, seperti seputar masalah identitas atau mungkin terdiri dari ruang di mana orang yang berpikiran sama bergabung bersama dalam pencarian Bersama.

- 3) Dimensi *Forms* (Dimensi Bentuk) Yang terdiri dari Bentuk yang terlihat (*Visible*), Bentuk Tersembunyi (*Hidden*), dan Bentuk yang tidak terlihat (*invisible*).

Dalam teori *Powercube* dikenal tiga macam bentuk kekuasaan, kekuasaan terlihat, kekuasaan tidak terlihat, dan kekuasaan yang tersembunyi. Begitupula dalam praktek politik lokal di daerah, terdapat kekuasaan yang terlihat, yang tidak terlihat, dan yang tersembunyi (*Halim, 2014*).

- a. Kekuasaan yang terlihat (*visible*)

Kekuasaan yang terlihat ini merujuk pada bentuk kekuasaan yang dapat dilihat dan diidentifikasi secara jelas dalam struktur sosial dan politik. Ini mencakup semua aktivitas, keputusan, dan kebijakan yang tampak, dan sering kali terkait dengan institusi formal. Contoh Kekuasaan yang terlihat yaitu aktor eksekutif, legislatif dan sebagainya yang dinilai mempunyai pengaruh atau

kekuatan untuk melakukan atau merubah sesuatu. Aktor disini jelas merupakan aktor yang ada dalam kekuasaan yang terlihat. (Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati 2018).

Gaventa meyakini bahwa Kekuasaan yang terlihat merupakan kekuasaan yang secara hukum memiliki wewenang untuk mengubah suatu kebijakan dalam berdemokrasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak Masyarakat.

b. Kekuasaan yang tersembunyi (*Hidden*)

Kekuasaan tersembunyi yaitu kekuasaan yang beroperasi dibalik layar dan tidak terlihat secara langsung dalam proses pengambilan Keputusan. Ini mencakup pengaruh yang tidak terdeteksi tetapi sangat signifikan dalam membentuk kebijakan. Kekuasaan ini juga merujuk pada kekuasaan yang digunakan oleh individu ataupun kelompok untuk mempengaruhi Keputusan tanpa terlibat secara langsung. Hal ini mencakup pengaruh yang bersifat strategis dan seringkali dilakukan secara diam-diam ataupun tersembunyi. Kekuasaan ini juga dikontrol oleh orang-orang tertentu atau institusi yang memiliki power institutions yang menjaga pengaruh mereka melalui pengontrolan terhadap siapa yang dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan Keputusan.

Gaventa menyatakan bahwa Bentuk-bentuk kekuasaan tersembunyi digunakan oleh kepentingan-kepentingan tertentu

untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka dengan menciptakan hambatan-hambatan terhadap partisipasi, dengan mengecualikan isu-isu utama dari arena publik, atau dengan mengendalikan politik di belakang layar. Bentuk-bentuk kekuasaan ini dapat terjadi tidak hanya dalam proses-proses politik, tetapi juga dalam konteks organisasi dan kelompok lainnya, seperti tempat kerja, LSM, atau organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Melalui bentuk-bentuk kekuasaan tersembunyi, pilihan-pilihan alternatif menjadi terbatas, orang-orang yang kurang berkuasa dan perhatian-perhatian mereka dikecualikan, serta aturan-aturan permainan ditetapkan agar bias terhadap orang-orang dan isu-isu tertentu.(Gaventa 2009)

c. Kekuasaan yang tidak terlihat (*Invisible power*)

Kekuasaan yang tidak tampak merupakan bentuk kekuasaan yang paling mendalam dan sulit dikenali. Kekuasaan jenis ini bekerja dengan cara membentuk batasan partisipasi secara ideologis dan psikologis. Artinya, bukan hanya isu-isu tertentu disingkirkan dari proses pengambilan keputusan, tetapi juga dihapus dari kesadaran dan pemikiran para aktor yang terlibat. Melalui pengaruh terhadap cara pandang masyarakat tentang posisi mereka di dunia, kekuasaan ini membentuk keyakinan, identitas diri, serta penerimaan terhadap keadaan yang ada, sehingga turut menetapkan apa yang dianggap normal, wajar, dan aman.

Secara kontekstual bahwa kekuasaan ini merupakan piranti petahana untuk meningkatkan elektabilitas oleh konstituen. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang ataupun calon dapat menginternalisasikan norma dan nilai masyarakat yang dapat menyebabkan individu secara tidak sadar mengontrol perilaku mereka sendiri untuk memenuhi harapan sosial (Luttrell et al. 2007).

Kekuasaan tersembunyi secara tidak langsung membuat hegemoni agar dapat dipercaya oleh masyarakat, biasanya kekuasaan tersembunyi menggunakan beberapa tokoh seperti tokoh agama, adat dan masyarakat. Tokoh-tokoh yang telah di tunjuk akan merekonstruksi sebuah pemahaman dan menggiringkan sebuah opini agar masyarakat menjadi memilih seorang calon (Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati 2018). Dukungan dari pemuka agama atau tokoh masyarakat memang berdampak sangat besar pada penambahan kekuatan. Bersilaturahmi dengan pemuka agama atau tokoh masyarakat adalah salah satu agenda penting guna meningkatkan kepercayaan Masyarakat. Gaventa menyatakan bahwasannya kekuasaan tersembunyi merupakan alat untuk mempertahankan kekuasaan yang paling ampuh, kepentingan-kepentingan pribadi selalu menjadi alasan yang cukup kuat untuk seseorang mempertahankan kekuasaan dan Privilege (Gaventa 2009). Dalam buku (Gaventa 2009) Gaventa menjelaskan

bahwasannya, walaupun ketiga kekuasaan ini disajikan secara terpisah, dalam praktiknya ketiga hal tersebut saling terikat erat.

2.1.2 Pemilihan Umum (Pemilu)

Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemeritahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dann segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilihan umum dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Samuel P. Huntington dalam (Labolo and Ilham 2015) menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi

melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negarayangakan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.

Di kebanyakan negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi Masyarakat. sekalipun demikian, disadari bahwasannya pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan lain-lain (Budiarjo 2008).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilu diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara. Pemilu juga merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat atau calon akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrument yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat atau wakil rakyat yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka. Pemilu merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi. Oleh karena itu kualitas dari pemilu juga dipengaruhi

oleh prakondisi demokrasi. Berdasarkan pendapat para ahli prakondisi tersebut antara lain Modernitas dan kesejahteraan, budaya politik, dan struktur sosial Masyarakat (Labolo and Ilham 2015).

Fungsi dari pemilu menurut rose dan mossawir dalam (Labolo and Ilham 2015) antarlain untuk menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politi, dan yang terakhir sebagai alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. sedagkan tujuan dari pemilu meliputi, Mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy). Selanjutnya sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat. Dan yang terakhir sebagai sarana memobilisasi dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut berpartisipasi dalam proses politik.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia dibedakan menjadi tiga masa yaitu pemilu masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin atau Orde lama, pemilu pada masa orde baru dan pemilu masa reformasi. Pemilu pada setiap masa memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan presiden pada masa itu. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno terdapat dua masa yang berbeda, masa Demokrasi Liberal dan masa Demokrasi Terpimpin,/ masa Orde Lama. Pada masa Demokrasi Liberal ini dilaksanakan pemilu untuk pertama kalinya tahun 1955. Pemilu yang pertama ini dinilai sangat demokratis karena walaupun diikuti oleh banyak partai (sistem multipartai) akan tetapi

pelaksanaan pemilu ini tergolong lancar dan tidak ada pelanggaran berarti, dan pada pemilu ini dihasilkan sebanyak 257 kursi untuk DPR dan 520 kursi untuk Konstituante. Pemilu kedua yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 1960 ternyata tidak bisa dilaksanakan karena pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang menyatakan Konstituante dibubarkan karena dianggap tidak mampu untuk merumuskan konstitusi negara.

Pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1971 pada masa jabatan Presiden Soeharto atau orde baru. Pada pemilu kedua ini Indonesia masih menggunakan sistem kepartaian multipartai namun terjadi pengurangan partai menjadi sepuluh partai. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup. Pemilu yang dilaksanakan ini hanyalah untuk memilih anggota DPR dengan perolehan kursi didominasi oleh Golkar. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 (enam) tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 (lima) tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri tahun 1998 karena kuatnya desakan dari mahasiswa agar segera dilakukan pergantian kekuasaan. Untuk mengisi kekosongan jabatan, maka diangkatlah Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Agar hasil pemilu 1997 diganti, maka Presiden BJ. Habibie mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang kedelapan pada tahun 1999. Pemilu tersebut akhirnya terlaksana tepat pada waktunya. Dengan dilaksanakannya pemilu tersebut, maka ini berarti Presiden Habibie mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Pada pemilu pertama di masa Reformasi ini keran demokrasi dibuka sebesar-besarnya. Dengan demikian kita kembali kepada sistem kepartaian

multipartai. Tercatat jumlah partai yang mengikuti pemilu sebanyak 48 partai. Pada masa ini pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR saja. Pemilu selanjutnya dalam kurun lima tahun berikutnya, yaitu tahun 2004 pemilu kembali dilaksanakan. Namun, berbeda dengan pemilu sebelumnya karena selain untuk memilih DPR, pemilu ini juga untuk memilih presiden/wakil presiden dan DPD untuk pertama kalinya. Tidak sebanyak pada pemilu 1999, partai politik peserta pemilu tahun 2004 sebanyak 24 partai politik. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta anggota DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/ kota) se-Indonesia periode 2004-2009 (Labolo and Ilham 2015). Selanjutnya pemilu pada masa reformasi ini dilaksanakan pada tahun 2009, 2014, 2019 dan yang terakhir tahun 2024 kemarin.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Kekalahan Petahana Pada Pemilihan Umum 2019: Studi Kasus Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (Mike Dewanti, Ridho Al Hamdi, David Efendi, 2022)	Meneliti tentang aktor legislatif dengan menggunakan teori <i>power cube</i>	Membahas mengenai kekalahan aktor legislatif	Dua faktor utama penyebab kekalahan petahana adalah kekuasaan terlihat (<i>visible power</i>) dan kekuasaan tersembunyi (<i>hidden power</i>). Dalam konteks <i>visible power</i> , kekalahan terjadi karena strategi kampanye Agus Sulistiyono yang kurang fokus pada

				Kabupaten Sleman, padahal kabupaten tersebut memiliki jumlah pemilih tertinggi. Sementara dari sisi hidden power, praktik politik uang yang dilakukan oleh lawan politiknya dinilai lebih kuat dan efektif, sehingga memengaruhi pemilih yang bersifat pragmatis.
2.	Petahana Independen dalam Perspektif <i>Power Cube</i> (Ahmad Fajar Rahmatullah, Tunjung Sulaksono, 2021)	Menganalisis kemenangan ditinjau dari perspektif <i>power cube</i>	Objek penelitian merupakan calon eksekutif (Bupati dan wakil Bupati)	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengoperasian dimensi ruang petahana menciptakan ruang partisipasi politik secara tertutup (closed space) dengan menghimpun dukungan masyarakat melalui jalur independen tanpa keterlibatan elite PAN. Sementara itu, pada dimensi bentuk kekuasaan, kemenangan petahana dijelaskan melalui tiga manifestasi kekuasaan: <i>visible power</i> , <i>hidden</i>

				<i>power</i>, dan <i>invisible power</i>. <i>Visible power</i> diwujudkan melalui citra keberhasilan pembangunan selama periode pertama mereka menjabat. <i>Hidden power</i> terlihat dari pengaruh mereka dalam mengendalikan aktor politik lokal, termasuk dukungan dari partai-partai besar seperti PAN, Golkar, dan Gerindra, meskipun petahana maju secara independen. Sedangkan <i>invisible power</i> tercermin dari relasi jangka panjang petahana dengan masyarakat dan tokoh agama, serta kampanye personal (blusukan) yang menyentuh akar budaya lokal.
3.	Hegemoni Rezim Politik di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Pati di bawah Kepemimpinan	Menganalisis mengenai relasi antar aktor dan lembaga menggunakan	Objek penelitian merupakan calon eksekutif (Bupati dan wakil Bupati)	Hasil penelitian menunjukkan rezim politik lokal terbentuk karena peran aktor-aktor lokal dan kekuasaan yang

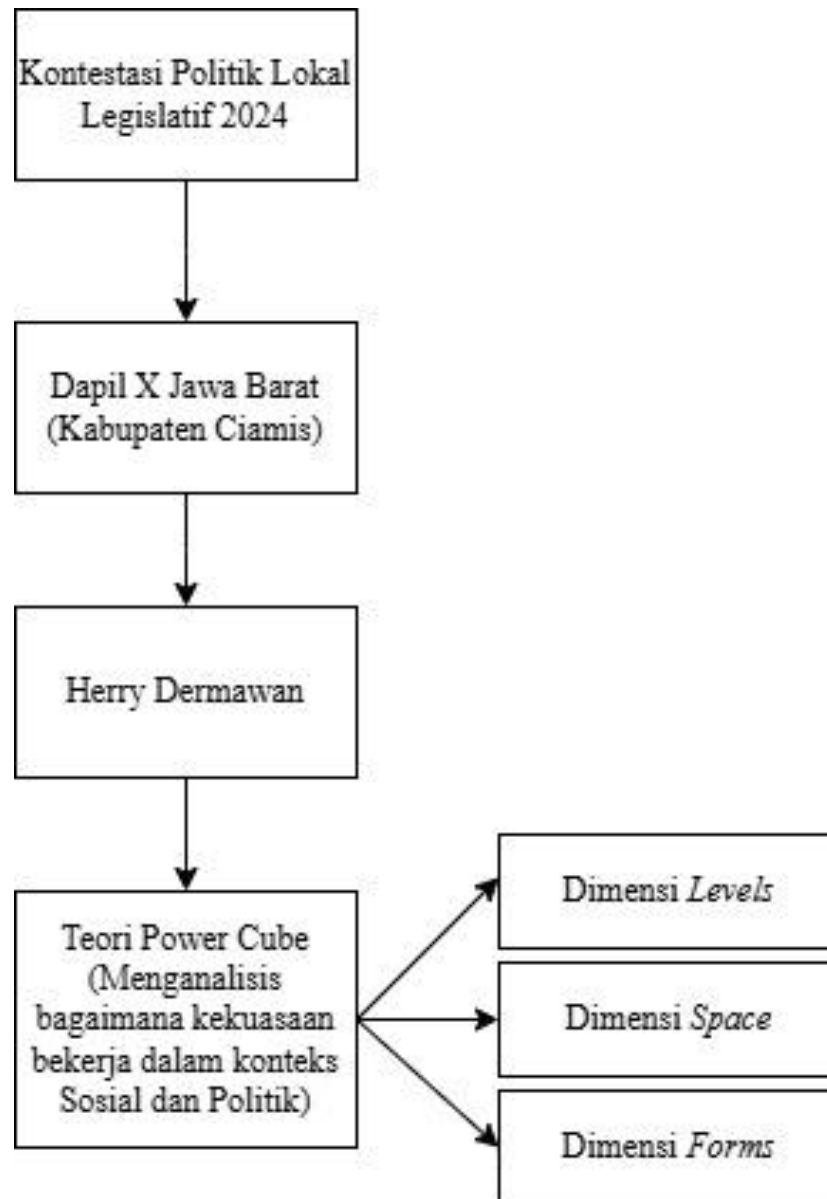
	Haryanto. (Aninditya Normalitasari & Laila Kholid Alfirdaus, 2020)	teori <i>power cube</i>		mereka miliki, baik formal (misal: DPR, Forkopimda) maupun informal (tokoh masyarakat/agam a). Power Cube digunakan untuk menganalisis kekuasaan terlihat (lembaga formal), tersembunyi (jaringan informal), dan tidak terlihat (hegemoni ideologi). Ketiganya saling berkaitan dalam membangun hegemoni politik lokal
4.	Relasi Kuasa Pemerintah dan LSM dalam Menangani KekerasanTerha dap Perempuan di Jakarta (Euginia, Teddi Ervianto, Piers Andreas Noak, 2025)	Menganalisis mengenai relasi menggunakan teori <i>power cube</i>	Objek penelitian merupakan suatu lembaga bukan aktor	Dalam dimensi teori Powercube, FBB menggunakan <i>visible power</i> melalui legitimasi sebagai organisasi kemanusiaan yang berkontribusi dalam ruang diskusi publik. <i>Hidden power</i> dimainkan melalui jaringan relawan dan aktivitas akar rumpun yang menjangkau kelompok rentan, sedangkan <i>invisible power</i> dijalankan dengan membangun opini

				publik serta kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dan hak-hak perempuan. Sementara itu, pemerintah masih mendominasi kebijakan formal dan sering kali menutup akses aspirasi masyarakat sipil.
5.	Hubungan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran Belanja Daerah (Hajarudin A, Robby, Andi Pandangai, 2023)	Menganalisis dinamika kekuasaan tersembunyi menggunakan teori <i>Power cube</i>	Hanya meneliti tentang hidden power saja dan perbedaan dari obek penelitian	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak semata mata untuk meningkatkan pelayanan publik, melainkan lebih didorong oleh kepentingan elite lokal. Kekuasaan tersembunyi terlihat dari dominasi kelompok etnis tertentu dalam panitia pemekaran, keterlibatan aktor politik dalam kampanye legislatif, serta manipulasi data

				administrative demi meloloskan pemekaran. Dalam penelitian ini juga menyoroti bagaimana kekuasaan non- formal berperan besar dalam proses politik lokal.
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Kontestasi politik lokal dalam Pemilihan Umum Legislatif menjadi ajang penting dalam dinamika politik daerah. Salah satu wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Daerah Pemilihan (Dapil) X Kabupaten Ciamis. Dalam konteks ini, muncul figure yang Ir. H. Herry Dermawan sebagai salah satu aktor

yang berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2024. Untuk menganalisis keterlibatan dan dinamika kekuasaan yang menyertai proses pencalonan dan kampanye hingga terpilihnya Ir. H. Herry Dermawan menjadi anggota DPR RI digunakan teori *Power cube* yang dikembangkan oleh John Gaventa. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja dalam konteks sosial dan politik secara lebih komprehensif. Teori *Power Cube* ini mengurai kekuasaan dalam tiga dimensi utama yaitu yang pertama dimensi *Levels* (Tingkatan) Dimensi ini menjelaskan tingkat di mana kekuasaan dijalankan, seperti lokal, nasional, atau global. Dalam kerangka ini, fokus utamanya adalah pada tingkat lokal, yaitu Kabupaten Ciamis sebagai ruang kontestasi politik. Analisis pada dimensi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kekuasaan lokal dibentuk, dijalankan, dan dipengaruhi oleh aktor-aktor politik, termasuk kandidat legislatif. Yang kedua yaitu Dimensi *Spaces* (Ruang), Kekuasaan tidak hanya dijalankan secara vertikal, tetapi juga dalam berbagai ruang yang bisa bersifat tertutup (*closed*), diundang (*invited*), atau diciptakan sendiri (*claimed*). Dalam konteks kampanye politik, ruang-ruang ini bisa berupa forum publik, media sosial, pertemuan warga, atau jaringan partai. Analisis pada dimensi ini menggali bagaimana Ir. H Herry Dermawan mengakses dan memanfaatkan ruang-ruang kekuasaan untuk membangun pengaruh dan legitimasi politiknya. Dimensi *Forms* (Bentuk). Dimensi ini mengeksplorasi bentuk kekuasaan yang bisa terlihat (*visible*) seperti kebijakan, aturan formal, dan struktur pemerintahan; tersembunyi (*hidden*) seperti kendali atas agenda politik; atau tidak terlihat (*invisible*) seperti nilai-nilai sosial, budaya, dan kepercayaan yang memengaruhi kesadaran masyarakat. Dalam kerangka ini, penting untuk

mengidentifikasi strategi kekuasaan yang digunakan oleh kandidat dalam memengaruhi opini publik, membentuk wacana, dan membangun relasi kuasa yang efektif. kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memahami secara utuh bagaimana kekuasaan bekerja dalam kontestasi politik lokal, serta bagaimana seorang aktor politik seperti Ir. H Herry Dermawan menavigasi ruang, bentuk, dan tingkat kekuasaan untuk mencapai tujuan politiknya dalam Pemilu Legislatif 2024.